

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PI MERINTAH DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2020

TUGAS AKHIR

*Dijukan kepada Tim Penguji Akhir Program Studi Akuntansi (D411) sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Studi*



Oleh :

FARADILLA AZHARI

NIM. 19113024

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

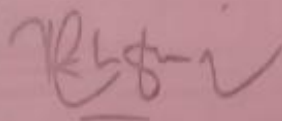
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2016-2020

Nama : Faradilla Azhari
NIM : 19133024
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, 23 Juni 2022

Diketahui Oleh

Ketua Prodi



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA
NIP. 198008092010121003

Disetujui Oleh

Pembimbing



Dr. Erindos NR, SE, M.Si, Ak.
NIP. 193807181989031002

LEMBAR PENGESAHAN




ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2020

Nama : Faradilla Azhari
NIM : 19133024
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 25 Juli 2022

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Ernos NR, M.Si, Ak (Ketua)	
2. Charoline Chesvvyanny, SE, M.Ak, Ak (Anggota)	
3. Mayar Afriyenti, SE, M.Sc (Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faradilla Azhari
Tahun Masuk/NIM : 2019/19133024
Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi/12 Juni 2000
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Diploma
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Sawah Dangka Nomor 142, Jorong III Kampung, Gadut
Judul Tugas Akhir : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau ditebarkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 23 Juni 2022

Faradilla Azhari
NIM 19133024

ABSTRAK

Faradilla Azhari : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020

Pembimbing : Dr.Erinos NR, SE, M.Si.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 dilihat dari : (1) Rasio Derajat Desentralisasi, (2) Rasio Kemandirian, (3) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan (5) Rasio Keserasian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitian, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang beralamat Jalan Sudirman No.27-29, Sapiran, Kec.Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kota Bukittinggi jika ditinjau dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata sebesar 13,76% dengan kategori kurang. (2) Rasio Kemandirian Keuangan dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata sebesar 16,27% dengan kriteria penilaian rendah sekali dan pola hubungan yang terjadi instruktif. (3) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata sebesar 98,14% dengan kriteria penilaian tidak efektif. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki rata-rata sebesar 100,41% dengan kriteria penilaian tidak efisien. (5) Rasio Keserasian berdasarkan belanja operasi dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata sebesar 60,29% sedangkan berdasarkan belanja modal memiliki rata-rata sebesar 23,06%.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020”** dengan baik serta shalawat dan salam kepada Nabi Yuna Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakulkarimah bagi seluruh penjuru dunia. Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya dari Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan kali ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam bentuk apapun dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang memberikan kemudahan serta kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Teristimewa kepada orang tua, Ayahanda Andri, Ibunda Asra Fitri dan Kakak penulis Arif Azhari serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk moral juga materil dan selalu mendoakan penulis dalam meyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Halkadri Fitra SE, MM.Ak, CA selaku Ketua Program Studi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Dr. Erinos NR, SE, M.Si.Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan, saran, serta nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan waktu yang telah ditentukan.
6. Ibu Herlina Helmy, SE,Ak., M.S.Ak., CA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Diploma III Akuntansi dan program studi lainnya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah berbagi ilmu dan membimbing penulis selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Bidang Akuntansi di Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang telah membantu penulis dalam pengambilan data selama penelitian.
9. Terimakasih untuk teman tersayang Yola Eka Safitri dan Husna Nadia Putri teman seperjuangan tugas akhir yang telah memberikan semangat, bantuan dan selalu setia dalam menyelesaikan tugas akhir ini.Semoga kita bisa sukses setelah ini yaa.Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.
10. Teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini Kak Etik, Malla, Dinda, Rifa, Yani, Nopa, Ezi, Ami, Winti terimakasih atas

semua support kalian. Semoga kita juga bisa sukses sesuai bidang kita masing-masing. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

11. Semua teman-teman seperjuangan khusus Diploma III Akuntansi 2019 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu sebelumnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan yang bersifat membangun atas laporan ini.

Akhir kalimat dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun kita bersama.

Padang, 23 Juni 2022

Faradilla Azhari

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINNJAUAN PUSTAKA	11
A. Otonomi Daerah	11
B. Kinerja Keuangan Daerah	12
1. Keuangan Daerah	12
2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	13
3. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	13
4. Kinerja Keuangan.....	14
5. Laporan Keuangan Daerah	15
6. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah	22
C. Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	25
BAB III PENEDEKATAN PENELITIAN	35
A. Bentuk Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Rancangan Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	36

2. Tahapan Penelitian	36
3. Objek Penelitian	37
4. Sumber Data	37
D. Teknis Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Instansi.....	41
1. Sejarah Kota Bukittinggi	41
2. Sejarah Singkat Badan Keuangan Kota Bukittinggi	44
B. Pembahasan.....	46
1. Rasio Derajat Desentralisasi.....	47
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	49
3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	52
4. Rasio Effisiensi Keuangan Daerah.....	54
5. Rasio Keserasian	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Pemerintah Kota Bukittinggi.....	5
Tabel 1.2 Belanja Pemerintah Kota Bukittinggi.....	6
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi.....	27
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	28
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	30
Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Rasio Effisiensi Keuangan Daerah.....	31
Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi.....	46
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	49
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	52
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Effisiensi Keuangan Daerah.....	54
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Operasi).....	57
Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Modal).....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kota Bukittinggi.....	42
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Kota Bukittinggi tahun 2016
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Kota Bukittinggi tahun 2017
- Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Kota Bukittinggi tahun 2018
- Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Kota Bukittinggi tahun 2019
- Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Kota Bukittinggi tahun 2020
- Lampiran 6 Foto Copy Surat Observasi Penelitian pada Kesbangpol Kota Bukittinggi
- Lampiran 7 Foto Copy Surat Balasan Izin Penelitian dari Kesbangpol Kota Bukittinggi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik khususnya reformasi manajemen keuangan daerah. Tonggak sejarah reformasi manajemen keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Otonomi daerah merupakan hak, kewajiban dan wewenang serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengatur, mengurus, dan mengelola pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi dengan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang dulunya sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah provinsi, kota dan kabupaten diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Adanya otonomi daerah, diharapkan suatu daerah mampu mengemban tanggung

jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat serta masyarakat pada daerah tersebut.

Suatu daerah dikatakan mampu melaksanakan otonomi yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Halim,2010)

Menurut Mardiasmo (2009) Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik. Penilaian akuntabilitas tersebut, bukan hanya semata berbicara mengenai bagaimana pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun terlebih pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kaidah prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien serta ekonomis.

Kinerja (*performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan(Tunggal, 1994). Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai suatu

sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilakukan atas hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja bidang keuangan pemerintah daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja tersebut dapat berupa keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD (Sari,2016)

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan akan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). APBD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. APBD merupakan wujud perencanaan penganggaran yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah dan mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan daerah sangat penting guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercaya. Analisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah salah satunya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah yang telah dilaksanakan. Rasio keuangan daerah memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan dan membiayai pemerintahannya, dengan adanya rasio keuangan daerah dapat dilihat hubungan kemampuan keuangan daerah dengan tingkat kesejahteraan daerah (Halim, 2008).

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan dengan cara menghitung analisis kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan analisis rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD dengan total penerimaan daerah, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi, 2010). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan suatu ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin rendah ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Halim, 2012).

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil

yang dimiliki daerah (Mardiasmo,2013). Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan yang diterima (Mahsun,2013). Rasio KecerAsian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal (Mahmudi.2010).

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah menggunakan laporan yang telah dibuat oleh pemerintah salah satunya Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentase
2016	Rp 675.267.277.741,89	Rp 647.045.721.855,85	95,82%
2017	Rp 710.125.538.263,16	Rp 653.374.887.189,69	92,01%
2018	Rp 720.174.380.033,00	Rp 695.592.067.770,61	96,59%
2019	Rp 749.055.030.480,00	Rp 734.106.696.896,05	98,00%
2020	Rp 690.981.742.486,00	Rp 689.222.919.606,62	99,75%

Sumber: Laporan Keuangan Kota Bukittinggi (yang diolah)

Berdasarkan data di atas jumlah pendapatan pemerintah daerah Kota Bukittinggi yang dianggarkan dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan begitupun dengan realisasi pendapatan juga mengalami hal yang sama. Berdasarkan persentase, realisasi pendapatan secara keseluruhan belum mencapai target yang dianggarkan. Dapat dilihat realisasi pendapatan pada tahun 2016 sebesar 95,82% dari pendapatan yang dianggarkan selanjutnya pada tahun 2017 sebesar 92,01%, tahun 2018 sebesar 96,59%, tahun 2019 sebesar 98,00% dan pada tahun 2020 hampir mencapai target pendapatan yang dianggarkan yaitu sebesar 99.75%. Berdasarkan keseluruhan persentase realisasi pendapatan belum mencapai target realisasi yang dianggarkan.

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Persentase
2016	Rp 739.912.598.927.22	Rp 630.661.294.710	85,23%
2017	Rp 732.873.501.966	Rp 590.090.904.898	80,52%
2018	Rp 834.430.535.411	Rp 703.783.285.316	83,94%
2019	Rp 890.512.534.056	Rp 716.528.264.978	80,46%
2020	Rp 882.978.637.855	Rp 795.954.479.300	90,14%

Sumber: Laporan Keuangan Kota Bukittinggi (yang diolah)

Berdasarkan data realisasi anggaran belanja pemerintah daerah Kota Bukittinggi diatas, dapat dilihat bahwa jumlah anggaran belanja dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Realisasi anggaran belanja jika dinyatakan berdasarkan persentase

mengalami fluktuasi setiap tahunnya, yang mana pada tahun 2016 sebesar 85,23% kemudian pada tahun 2017 sebesar 80,52% setelah itu di tahun 2018 sebesar 83,94% berikutnya di tahun 2019 sebesar 80,46% dan terakhir pada tahun 2020 sebesar 90,14% dari tahun sebelumnya. Jumlah realisasi belanja yang terjadi pada pemerintah daerah Kota Bukittinggi secara keseluruhan tidak mencapai target realisasi belanja yang telah dianggarkan setiap tahunnya.

Berdasarkan data pada table 1 dan 2 menunjukkan terjadinya fluktuasi pada pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kota Bukittinggi, tetapi keseluruhan data pada tabel tersebut belum mampu menjelaskan apakah realisasi dan anggaran pada pemerintahan tersebut sudah menunjukkan hasil yang baik atau tidak. Penilaian kinerja dinilai berdasarkan rasio, apakah sudah termasuk rasio yang dikategorikan sangat baik, baik, sedang, cukup, kurang dan sangat kurang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2016-2020 menggunakan analisis dari Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, dan Rasio Aktivitas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah Kota Bukittinggi dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urutan permasalahan di atas maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 diukur dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
3. Bagaimana kinerja Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 diukur dengan menggunakan Efektivitas PAD?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 diukur dengan menggunakan Efisiensi Keuangan Daerah?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 diukur dengan menggunakan Rasio Keserasian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian tugas akhir ini yaitu, untuk:

1. Menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 diukur dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi
2. Menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

3. Menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 diukur dengan menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
5. Menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016-2020 diukur dengan menggunakan Rasio Keserasian

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pemerintah daerah dan pihak lain yang membaca hasil penelitian ini.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh penerapan teori rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, serta rasio efisiensi keuangan daerah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah juga mendapatkan manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai bahan referensi dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.